



▶ ANGGARAN WAKIL RAKYAT

## Pemda Potong Dana Kunker

**UMBULHARJO—Anggaran kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja selama 2018 dipangkas Rp5,6 miliar.**

Ujang Hasanudin  
hasanudin@harianjogja.com

- ▶ Pemerintah Kota Jogja dan DPRD Kota Jogja diminta melakukan efisiensi anggaran.
- ▶ Khusus untuk perjalanan dinas yang sifatnya konsultasi dan advokasi dikurangi dari tiga hari menjadi dua hari.

Pemangkasan itu berdasarkan hasil evaluasi Gubernur DIY terhadap APBD Kota Jogja 2018. Dalam evaluasi Gubernur DIY pada akhir tahun lalu, Pemerintah Kota Jogja dan DPRD Kota Jogja diminta melakukan efisiensi anggaran. Gubernur meminta alokasi belanja daerah agar lebih fokus pada inti kegiatan. Sementara alokasi belanja pendukung kegiatan seperti perjalanan dinas dan biaya makan dan minum agar dihemat secara selektif.

Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kota Jogja, Prima Hastawan membenarkan adanya pengurangan sejumlah anggaran Dewan. Total anggaran Dewan selama tahun ini awalnya Rp52 miliar, kemudian dikurangi menjadi Rp46 miliar. "Yang paling banyak dikurangi pos anggaran perjalanan dinas dari Rp33,7 miliar menjadi Rp28,1 miliar," kata dia, saat ditemui di kantornya, Selasa (9/1).

Sementara pengurangan pos anggaran lainnya seperti publikasi dan biaya pengadaan alat kantor, kata Prima, pengurangannya tidak terlalu banyak. Hanya sekitar satu sampai dua jutaan.

Akibat adanya pemangkasan anggaran perjalanan dinas, volume perjalanan dinas pun dikurangi. Khusus untuk perjalanan dinas yang sifatnya konsultasi dan advokasi dikurangi dari tiga hari menjadi dua hari. Sementara perjalanan dinas lainnya seperti studi banding tetap tiga hari.

Selain volume perjalanan dinas yang berkurang, perjalanan dinas dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang diperbolehkan hanya raperda yang sudah ada naskah akademiknya (NA).

Ketua DPRD Kota Jogja, Sujanarko mengatakan pengurangan anggaran perjalanan dinas tidak akan mempengaruhi kinerja Dewan. "Kami sudah menyiasatinya dengan mengarahkan agar perjalanan dinas komisi harus ada konsultasi. Kunjungan kerja komisi juga bisa digunakan untuk mencari NA [naskah akademik] khusus untuk raperda inisiatif Dewan," kata Sujanarko.

Pada tahun ini total ada 31 raperda yang akan dibahas. Sebanyak 12 raperda merupakan raperda luncuran tahun lalu sehingga tidak lagi difasilitasi perjalanan dinas kecuali hanya biaya makan dan minum saat rapat. Sementara tiga raperda merupakan raperda APBD Murni, APBD Perubahan, dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tidak difasilitasi perjalanan dinas. Sujanarko menambahkan masa efektif hari kerja Dewan di kantor selama setahun ke depan hanya 74 hari dari total 243 hari. Sisanya kegiatan di luar kantor untuk kunker, reses dan bimbingan teknis dalam DIY.

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditangg
<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005